

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Halaman Pengesahan	ii
Lembar Telah Dilaksanakannya Ujian Skripsi	iii
Motto.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	viii
Daftar Perundang-Undangan.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Metode Penelitian.....	12
1.3.1. Pendekatan Masalah.....	12
1.3.2. Sumber Bahan Hukum.....	13
BAB II KEBEBASAN BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF HAM DI INDONESIA	16
2.1. Sejarah Hak Asasi Manusia.....	16
2.1.1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).....	18
2.1.2. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi.....	21

2.1.3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.....	28
2.2. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia.....	30
2.3. Kebebasan Beragama.....	33
2.3.1. Hak yang tidak dapat dikurangi (<i>Non-derogable rights</i>) dan Hak yang dapat dikurangi (<i>Derogable rights</i>).....	35
2.3.1.1. Hak yang tidak dapat dikurangi (<i>Non-derogable rights</i>).....	36
2.3.1.2. Hak yang dapat dikurangi (<i>Derogable rights</i>).....	39
2.4. Forum Internum dan Forum Eksternum.....	40
2.4.1. Forum Internum.....	42
2.4.2. Forum Eksternum.....	44
2.5. Analisis Putusan Mahkamah Konsitusi Nomer 140/PUU-VII/2009.....	45
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK KAUM MINORITAS	
“SYIAH” DI SAMPANG	51
3.1. Pengertian Kaum Minoritas	51
3.2. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1787 K/Pid/2012.....	53
3.3. Perlindungan Hukum oleh Negara untuk Kasus “Syiah” di Sampang.....	64
3.4. Tanggung Jawab Negara terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia.....	67
BAB IV PENUTUP	73
4.1. Kesimpulan.....	73
4.2. Saran.....	74
DAFTAR BACAAN.....	75

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/Penodaan Agama.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Universal Declaration of Human Rights (UDHR).